

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah suatu organisasi internasional yang pada konsep awalnya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk menciptakan keadaan stabil serta kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhirnya, seperti yang tercantum dalam *DUMBARTON OAKS PROPOSAL*. Awal penciptaan Perserikatan Bangsa yaitu pada Konfrensi San Fransisco yang berakhir pada tanggal 26 Juni 1945, dengan menghasilkan *PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA*, yang secara resmi mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945, dimana tanggal ini kemudian resmi ntenjadi tanggal perayaan atau hari jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diratifikasi oleh sebagian besar dari 51 anggota pertamanya, yang kini telah menjadi 185 negara anggota¹, dimana Indonesia termasuk didalamnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama anggotanya, yang secara hukum terikat pada kerjasama dalam mendukung prinsip-prinsip dan tujuan yang ada dalam piagam tersebut bekerjasama untuk melenyapkan peperangan, menggalakkan hak-hak asasi manusia, mempertahankan keadilan dan Hukum Internasional, meningkatkan kemajuan sosial dan hubungan diplomasi diantara bangsa-bangsa dengan memanfaatkan

Organisasi Internasional sebagai badan pemersatu, demi tercapainya tujuan bersama.

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi dunia terbuka untuk semua bangsa yang cinta perdamaian, dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sedangkan badan-badan utama, berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 7 Bab III, terdiri dari enam badan, antara lain :

Pertama adalah **Majelis Umum**, menurut pasal 9 chapter, anggota Majelis Umum terdiri dari semua anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. Setiap negara anggota diwakili oleh sebanyak-banyaknya 5 orang wakil, tetapi hanya punya hak satu suara.

Kedua adalah **Dewan Keamanan**, anggota Dewan Keamanan terdiri dari 1 anggota tetap dan 2 anggota tidak tetap.

Ketiga adalah **Dewan Ekonomi Dan Sosial**, dibentuk sebagai organ utama untuk mengkoordinasikan kerja dibidang ekonomi dan sosial dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan serta lembaga-lembaga khusus lainnya.

Keempat yaitu **Mahkamah Internasional**, satu-satunya badan Hukum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta seluruh warga negaranya menjadi subyek dari pada Hukum Internasional, bahkan negara yang bukan anggota pun dapat menjadi pihak atas syarat-syarat yang ditentukan oleh

Sidang Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan

Kelima adalah **Dewan Perwakilan**, berdasar Piagam dibentuk Dewan Perwakilan sebagai salah satu badan-badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberi tugas kepada Dewan untuk mengawasi Pemerintahan Wilayah. Wilayah Perwakilan dan pertumbuhan mereka yang cepat menuju pemerintahan sendiri.

Keenam yaitu **Sekretaris Jendral**, Sekretaris Jendral merupakan Kepala Administrasi, akan tetapi lebih lanjut digambarkan sebagai diplomat dan aktivis, penganjur dan juru damai. Sekretris Jendral berdiri di depan masyarakat Internasional sebagai lembaga utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena Sekretariat dan staf-lah yang menjadi motor bagi jalannya serta efektif-tidaknya satu organisasi.

Berdasarkan kualifikasi diatas, kemudian penulis memilih judul " PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PASCA KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR ". Sebagai judul dari penelitian ini.

Mengingat Timor-Timor merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam daftar Program Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa². Selain itu Proses pembentukan kedaulatan yang utuh di bumi Timor Timur masih memerlukan perhatian khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta masyarakat Internasional.

² Table : *Dependent Teritoris as of 1983 dalam A Teaching Gurde United Nation and Decolonization* (New York, United Nation 1984), hal 18

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan adalah :

1. Mendiskripsikan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi Internasional yang ingin menciptakan perdamaian dunia.
2. Menjelaskan secara umum kondisi pemerintahan Timor Timur pasca kemerdekaan.
3. Memberikan gambaran secara obyektif peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi Internasional yang hendak mencapai tujuan piagamnya, dalam membantu proses pembentukan pemerintahan kembali di Timor Timur.
4. Sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat memberikan informasi dan bacaan bagi pihak yang tertarik dengan masalah tersebut.
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Timor Timur adalah wilayah yang pertama kali merupakan jajahan Portugal, hal ini tercantum dalam Undang-undang yang dikeluarkan oleh Portugal pada tahun 1933, akan tetapi perjalanan yang ditempuh oleh masyarakat Timor Timur sebagai jajahan Portugal menyebabkan berbagai

1. 2024-11-11 10:11:11 AM di wilayah tersebut, terlebih lagi pada tahun

1963, tepatnya pada tanggal 22 November melalui dekrato no 45378³ Portugal mengubah status daerah koloninya, termasuk didalamnya adalah Timor Timur menjadi Propinsi Seberang Lautan. Bersamaan pada waktu itu banyak terjadi tuntutan dari rakyat yang terjajah, untuk segera bebas dari dominasi penjajah kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti halnya yang dialami oleh masyarakat di Timor Timur juga menginginkan adanya kemerdekaan, bebas dari penjajahan Portugal. Terlebih lagi telah adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai suatu Organisasi Internasional yang mempunyai konsep dasarnya adalah memecahkan perbedaan negara dan untuk memajukan kerjasama antara negara yang diakibatkan oleh adanya ketegangan-ketegangan yang mengarah pada peperangan, karena pada zaman dahulu perang adalah satu-satunya jalan.

Untuk memecahkan masalah dan menyelaraskan perbedaan, oleh karena itu para ahli pemerintahan dan negara-negara didunia bersepakat untuk membentuk suatu wadah Internasional yang berguna untuk menampung, menyelaraskan sekaligus menyelesaikan masalah dan perbedaan negara-negara di dunia sehingga peperangan dapat dihindari dan dicegah. Selain itu salah satu kegunaan dari Organisasi Internasional ini adalah sebagai pusat segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa untuk mencapai kerjasama Internasional dalam memecahkan

3 Soekanto, *Integrasi : Kebulatan Tekad rakyat Timor-Timor* (Jakarta : Yayasan Parikesit, 1976), Hal. 10

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa teori konsep untuk mempermudah penelitian. Adapun definisi teori adalah :⁵

1. Teori merupakan rangka dasar untuk mengatur fakta-fakta
2. Teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
3. Teori merupakan seperangkat pernyataan mengenai keadaan yang diharapkan.
4. Teori merupakan abstraksi.

Kemudian teori yang digunakan oleh penulis adalah teori yang menyangkut ataupun berkolerasi dengan objek yang hendak diteliti dan oleh penulis akan diterapkan dalam penelitian ini sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa fenomena politik yang terjadi, sehingga teori yang diambil oleh peneliti adalah :

1. Teori Peranan

Menurut Jack C.Plano dalam bukunya Kamus Analisa Politik menyatakan bahwa, “peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu”. Dalam teori peranan, aktor politik yang memegang posisi tertentu tersebut dapat berupa individu ataupun kelompok. Teori peranan juga menegaskan bahwa “ perilaku politik.....adalah perilaku dalam menjalankan peranan

politik.⁶ Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik.

Berdasarkan asumsi teori peranan yang dikemukakan oleh Alan C. Isaak dalam bukunya *Scope And Methods of Political Science*, menyatakan bahwa perilaku politik seorang aktor politik itu sebagai akibat dari harapan sebagaimana posisi yang dipegangnya. Dalam buku yang sama menyatakan bahwa ada dua sumber harapan, yaitu "outsider" dan "insider".⁷ Harapan dari dalam tersebut muncul dari aktor pemegang posisi tertentu yang berkaitan dengan fungsi dan tugas yang sedang diembannya. Sedangkan harapan dari luar tersebut datang dari masyarakat luas yang dapat mempengaruhi perilaku aktor pemegang posisi tertentu.

Keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi Internasional fungsional di Timor Timur pasca kemerdekaan maupun sebelum adanya jejak pendapat sangat meringankan penderitaan masyarakat yang berada di Timor Timur sekaligus mewujudkan kepentingan nasional di wilayah tersebut yaitu menciptakan keadaan yang aman dan kondusif. Karena sesuai dengan fungsi didirikannya Organisasi Internasional ini yaitu memberikan bantuan kepada negara-negara yang ada diseluruh dunia, menciptakan keadaan yang aman, tenteram serta menciptakan perdamaian dunia, menyelesaikan konflik dan

⁶ Alan C Isaak, *Scope and Methods of Political Science* (Homewood, III : Drsey Prees 1981), hal 254

⁷ Ibid. hal 225

menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dengan baik, dimana keadaan rakyat Timor Timur tentunya sebagai variabel yang menggerakkan badan-badan yang berada di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berperan secara aktif membantu menyelesaikan persolan yang ada didaerah tersebut. Lebih daripada itu bantuan yang diharapkan oleh masyarakat Timor Timur adalah Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang komplek yang terjadi di Timor Timur, baik dalam bidang pangan, sandang, papan, keamanan, dan diharapkan terlebih lagi tercipta pemerintahan yang kondusif yang diharapkan oleh semua rakyat. Dari uraian diatas maka teori peran, lebih mengacu pada peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Timor Timur, yaitu bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengupayakari perbaikan serta mengkoordinasi pembentukan pemerintahan yang terjadi di Timor Timur, dalam hal ; pembentukan organ pemefintahan, pembentukan perundang-undangan, upaya pembentukan badan-badan peradilan, serta pengkondusifan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga Perserikatan Bangsa-Bangsa diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai macam ketidakteraturan serta rekonstruksi wilayah tersebut.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, atribut suatu

adalah dukungan, tuntutan, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan. Selain itu konsep dapat berupa sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen, rule making, rule application, rule adjudication, birokrasi partai politik, kelompok kepentingan, eksekutif, legislatif, yudikatif⁸.

Konsep dapat juga berarti suatu gambaran atau gagasan jiwa yang dibentuk atas dasar penggeneralisasian sifat-sifat sekelompok benda. Konsep adalah suatu abstraksi yang menelorkan deskripsi, karena itu ia bisa diterapkan kepada hal-hal khusus dari suatu penggolongan yang bersangkutan dengan konsep⁹. Konsep adalah batang tubuh ilmu politik dan setiap disiplin ilmu lainnya.

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain¹⁰.

Sebuah permasalahan baru yang muncul dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, muncul kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan atas daerahnya, terlihat bahwasannya globalisasi, etnisitas, serta tantangan konsep nasionalisme sangat tipis perbedaannya¹¹. Etnisitas dan Nasionalisme menjadi pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, dalam pertarungan globalisasi, terlebih lagi bila dihadapkan dengan wacana wilayah yang terpisah-pisah berupa kepulauan, seperti Indonesia.

⁸ Chilcote, Ronald H, 1981. *Theories of Comparative Politics : The Search for a Paradigm*. Westview Press, Boulder, Colorado. Chapter I : Comparative Inquiry, Hal 3-12

⁹ Jack C Plano, Robert E. Riggs, Helena S. Robin. *Kamus Analisa Politik*. Hal 38

¹⁰ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi (Jakarta : LP3ES, 1990), Hal 163

¹¹ PM Laksono, Rocky Gerung, Kata Pengantar Drs. Cornelis Lay, M.A. *Nasi*

Pada dasarnya Indonesia sangat rawan dengan adanya perpecahan, serta pemisahan kepulauan, banyak pulau yang ingin merdeka, berdiri sendiri, melepaskan diri dari kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contohnya adalah Timor Timur, wilayah ini menjadi perhatian utama pada masa jabatan Presiden Habibie.

Secara garis besar konsep yang terbangun di wilayah Timor Timur merupakan suatu kepentingan yang timbul dari masyarakat Timor Timur yang menginginkan kemerdekaan yang didalamnya dapat kita lihat adanya dukungan, tuntutan, kelompok kepentingan dan lainnya. Hingga pada akhirnya turut campur Perserikatan Bangsa-Bangsa diperlukan didalamnya, untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung, karena pada dasarnya permasalahan Timor Timur lebih merupakan pertikaian kelompok-kelompok kepentingan yaitu antara Portugal, kelompok pro-kemerdekaan, dan Indonesia. Memang dalam hal ini kepentingan masing-masing negaralah yang bermain didalamnya, dimana ada kepentingan Portugal didalamnya dimana Timor Timur merupakan wilayah bekas koloninya, kemudian dari pihak Indonesia, dimana Timur-timur adalah salah satu wilayah yang berada dalam teritorial Indonesia, dan banyak negara didunia yang mengakuinya, selain itu terakhir adalah kepentingan warga yang menginginkan kemerdekaan. Berbagai macam kepentingan diatas telah banyak memakan korban dan kerugian baik materiil maupun imateriil. Setelah jejak pendapatpun masih terdapat tarik ulur kelompok-

kemerdekaan. Akan tetapi dari beberapa kepentingan diatas penulis lebih menekankan pada konsep kepentingan nasional yang ada di Timor Timur, yaitu setelah kemerdekaan. Rakyat Timor Timur mempunyai kuasa penuh terhadap wilayahnya, mereka mempunyai otoritas dalam memajukan wilayahnya, pemerintahannya, perekonomiannya, serta keamanan daerah tersebut, walaupun demikian Timor Timur masih membutuhkan dan memanfaatkan pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penyokong, pembantu serta pengawas jalannya pemerintahan, selain itu juga sebagai tangan panjang Timor Timur untuk merangkul negara-negara yang ada di dunia. Secara tidak langsung maka konsep kepentingan telah dilakukan oleh Timor Timur, yaitu demi kepentingan Nasional wilayah Timor Timur, mereka menggunakan pihak-pihak yang Pro dengan mereka untuk membantu terciptanya kemerdekaan di bumi Timor Timur, mereka juga memanfaatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak penengah dan tempat perundingan masalah Timor Timur.

Konsep Kepentingan Nasional tetap menjadi perhatian karena selain adanya peran perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur, agar terdapat sebuah kesinambungan serta korelasi maka konsep kepentingan Timor Timur juga menjadi sebuah pembahasan. Dengan adanya Teori Peran serta Konsep Kepentingan yang saling menunjang akan diperoleh

F. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada di Timor Timur pasca kemerdekaan adalah :

1. Membantu dalam proses pembentukan pemerintahan, yaitu dalam pemilihan presiden, serta pejabat dalam pemerintahan
2. Membantu mengusahakan terciptanya Undang-Undang serta tatanan hukum yang lebih terkoordinir dan tersusun dengan baik.
3. Mengkoordinasi badan-badan pemerintahan serta peradilanannya
4. Membantu tetap terjaganya keamanan serta membantu pemulihan perekonomian (sandang, papan, pangan) serta masalah pengungsian

Secara garis besar peran Perserikatan Bangsa-Bangsa yang awalnya adalah sebagai Peace Keeping Operation setelah kemerdekaan lebih mengarah ke proses Peace Building Operation.

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu melebar dan tidak keluar dari topik yang akan dibahas, maka penulis mencoba memberikan batasan pada penyusunan skripsi ini. Penulis hanya akan membahas sepanjang peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Timor Timur yaitu sesudah

pemerintahan yang ada di Timor Timur. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis akan sedikit membahas beberapa kejadian sebelum kemerdekaan yaitu setelah jejak pendapat tahun 1999 hingga menuju kemerdekaan sebagai latar belakang peran Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur dan akan tetap menjadi pembahasan yang penting untuk dapat sampai pada hasil akhir atau kesimpulan.

H. Teknik Pengumpulan Data.

Penulis memperoleh data melalui teknik pengumpulan data dari buku, surat kabar, artikel dan internet yang berhubungan dengan peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di Timor Timur, terutama pasca kemerdekaan, serta pembentukan pemerintahannya.

I. Garis Besar Isi Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis melakukan penyusunan skripsi secara sistematis yang terbagi dalam lima Bab, dengan perincian :

Bab I terdiri atas : alasan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teoritik, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan garis besar isi.

Bab II akan diuraikan secara umum tentang keadaan yang ada di

Timor Timur pada masa penjajahan Belanda dan Timor Timur, yaitu ta

serta letak geografisnya, serta perkembangan portugal, kemudian akan diuraikan tentang gambaran secara umum kehidupan rakyat Timor Timur pada masa pemerintahan Indonesia, tentang kondisi masyarakat Timor Timur serta latar belakang campur tangan Indonesia di Timor Timur. Dalam bab ini juga akan diterangkan tentang munculnya integrasi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Yang terakhir adalah kondisi Timor Timur pasca jejak pendapat hingga menjelang kemerdekaan.

Bab III akan diuraikan tentang latar belakang Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Timor Timur yang meliputi : Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian latar belakang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur, yaitu : upaya pelaksanaan termasuk landasan kerja PBB, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, kemudian strategi yang diterapkan oleh PBB dalam program penataan kembali keadaan di Timor Timur.

Bab IV adalah tentang peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya bantuan pemerintahan di Timor Timur, meliputi pembentukan organ pemerintahannya, yaitu tentang pemilihan kepala negara, serta pejabat-pejabat yang akan membantu presiden dalam menyelesaikan segala macam persoalan dalam pemerintahan. Kemudian penataan hukum serta undang-undang yang akan diterapkan, pembentukan badan badan yang duduk dalam pemerintahan serta badan peradilanannya. Selain itu dalam bab

